

ANALISIS PERHITUNGAN PENYUSUTAN AKTIVA TETAP MENURUT PSAK NO 16 DAN PERATURAN PAJAK DAN PENGARUHNYA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PADA PT SINAR LANGKAT PERKASA

Oleh:

Finka Nerrytan, Duffin

This research is done in PT Sinar Langkat Perkasa. The company is engaged in Agriculture, Palm Oil Processing Equipment business activities. The company is located at JL. Jemadi, Komplek Jemadi Permai 40, 20116, Pulo Brayan Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20239, Indonesia. The purpose of this research is to know the impact of fixed asset depreciation for entity's income tax at PT Sinar Langkat Perkasa. Types of this research is in form of descriptive research with case study in PT. Sinar Langkat Perkasa and the research object is analyzing the recognition and depreciation of fixed asset at PT. Sinar Langkat Perkasa for period year 2020 based on Income Tax Provision and analyzing the impact of depreciation of fixed asset to entity's income tax calculation. Data which is collected is secondary data include the presentation of financial statement, income tax expense calculation, and depreciation calculation in year 2020 and other information which is related with this research. The research result shows that fixed asset depreciaton at PT. Sinar Langkat Perkasa Medan in year 2020 is not in accordance with income tax provision. The company implements straight line method in calculating depreciation expense. The group of fixed asset is not determined properly by the company. The company does not calculates the depreciation expense of building and furniture properly according to income tax provision. The fixed asset depreciation expense calculated by the company is Rp 533,875,000.00 and the fixed asset depreciation expense based on income tax provision is Rp 443,125,000.00. There is difference of fixed asset depreciation in amount of Rp 90,750,000.00. It can occur because there is difference in useful life and depreciation rate of fixed asset. The depreciation expense of building calculated by the company is Rp 240,000,000.00 while the depreciation expense of building based on income tax provision is Rp 180,000,000.00. The depreciation expense of furniture calculated by the company is Rp 82,000,000.00 while the depreciation expense of furniture based on income tax provision is Rp 51,250,000.00. The company should conduct fiscal correction in amount of Rp 90,750,000.00. After implementation of depreciation of fixed asset based on income tax provision, the entity income tax expense is Rp 433,697,280.00.

Keywords: Fixed Asset, Depreciation and Entity Income Tax.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perusahaan sebagai suatu organisasi mempunyai kegiatan-kegiatan tertentu dalam usahanya untuk mencapai tujuannya. Pada umumnya tujuan utama suatu perusahaan adalah untuk memperoleh laba. Setiap perusahaan dalam melakukan kegiatannya menggunakan aktiva tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh yang digunakan dalam kegiatan perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap adalah aset perusahaan dengan periode lebih dari satu periode akuntansi. Aset tetap merupakan aset penting

perusahaan yang jumlahnya signifikan dalam laporan keuangan.

Pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh aset tetap harus dicatat sebagai beban selama periode penggunaan aset tersebut. Aset tetap awalnya harus diukur pada biaya. Biaya meliputi semua pengeluaran normal dan wajar yang diperlukan untuk mendapatkan aset pada tempatnya dan siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya. Aset tetap merupakan salah satu akun penting dalam laporan keuangan. Aset tetap biasanya merupakan proporsi yang signifikan dari sebagian besar neraca perusahaan. Aktiva tetap memerlukan perlakuan akuntansi tertentu karena dibeli pada waktu tertentu dan penggunaannya

tersebar selama beberapa tahun. Untuk keperluan laporan keuangan, penyusutan aktiva tetap harus dihitung secara akurat agar kinerja keuangan perusahaan dapat diketahui secara akurat oleh pemilik. Perusahaan akan memberikan laporan keuangannya berdasarkan standar akuntansi keuangan. Dalam Standar Akuntansi Keuangan, perusahaan dapat memperkirakan masa manfaat aset tetap. Perusahaan harus dapat menerapkan metode penyusutan yang tepat pada aset tetap tertentu.

Salah satu sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah sistem self assessment. Sistem penilaian sendiri adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan peraturan perpajakan. Perusahaan sebagai wajib pajak badan perlu menyusun laporan keuangan. Setiap perusahaan pada dasarnya akan menyusun laporan keuangannya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. Laporan keuangan ini kemudian digunakan untuk mencerminkan kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Untuk melaporkan pajak penghasilan, maka wajib pajak perlu menyiapkan SPT sebagai sarana laporan laba rugi fiskal. Sebagai dasar penghitungan pajak penghasilan maka wajib pajak perlu menetapkan laporan laba rugi fiskal yang terdiri dari penghasilan dan beban yang diakui sesuai dengan Ketentuan Pajak Penghasilan.

Terdapat perbedaan pengukuran dan pengakuan aset tetap berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan Ketentuan Pajak Penghasilan. Perbedaan utama dalam perhitungan penyusutan adalah klasifikasi aset, masa manfaat aset dan pilihan metode penyusutan. Ketentuan Pajak Penghasilan secara khusus mengatur klasifikasi aset tetap. Metode penyusutan menurut Ketentuan PPh diperbolehkan memilih metode garis lurus atau metode saldo menurun. Sebagai dasar penghitungan pajak penghasilan maka wajib pajak perlu menetapkan laporan laba rugi fiskal yang terdiri dari penghasilan dan beban yang diakui sesuai dengan Ketentuan Pajak Penghasilan. Untuk

keperluan pembayaran pajak, wajib pajak harus melakukan penyusutan aset tetap sesuai dengan Ketentuan Pajak Penghasilan.

Penelitian ini dilakukan di PT. Sinar Langkat Perkasa. Perusahaan ini bergerak di bidang distributor sparepart. Perusahaan memiliki aktiva tetap yang digunakan untuk kegiatan usaha. Perusahaan harus mengakui biaya perolehan aset tetap berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dalam laporan keuangan komersial. Beban penyusutan berdampak pada laporan keuangan karena beban penyusutan merupakan bagian dari unsur biaya. Untuk tujuan perpajakan, perusahaan harus melakukan kewajiban perpajakan berdasarkan Ketentuan Pajak Penghasilan. Karyawan perusahaan tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup tentang pajak. Ada kemungkinan beban penyusutan di perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan PPh karena pegawai perusahaan melakukan perhitungan beban penyusutan yang tidak tepat. Oleh karena itu, perhitungan beban penyusutan yang tidak tepat dapat membuat perhitungan beban pajak penghasilan menjadi tidak tepat.

Untuk menganalisis penerapan penyusutan aktiva tetap terhadap pajak penghasilan perusahaan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi : "Analisis Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Menurut PSAK No 16 Dan Peraturan Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Pada PT. Sinar Langkat Perkasa"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang studi yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang penulis identifikasi dalam penelitian ini adalah: "Apakah pelaksanaan penyusutan aktiva tetap untuk perhitungan pajak penghasilan badan pada PT. Sinar Langkat Perkasa sesuai dengan Ketentuan PPh ?"

1.3. Lingkup Penelitian

Karena keterbatasan waktu, kemampuan dan pengetahuan, maka penulis akan menentukan analisis penyusutan aset tetap pada PT. Sinar Langkat Perkasa tahun 2020. Penulis juga

menganalisis dampak penyusutan aset tetap terhadap pajak penghasilan badan PT. Sinar Langkat Perkasa pada tahun 2020.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penyusutan aktiva tetap terhadap pajak penghasilan badan pada PT. Sinar Langkat Perkasa.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Aktiva Tetap

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018, p.16.2), aset tetap adalah aset berwujud yang :

- (a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administrative; dan
- (b) diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode

Menurut Sumarsan (2017, p.163), aktiva tetap adalah aktiva yang dibeli oleh perusahaan atau orang pribadi yang digunakan untuk operasional perusahaan yang memiliki nilai yang relatif tinggi, memiliki umur manfaat lebih dari satu tahun dengan nilai perolehan yang relatif tinggi dan tidak untuk diperjualbelikan.

Prasetya (2017, p.120), dari berbagai aset tetap yang dimiliki perusahaan, dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Aset tetap yang umurnya tidak terbatas adalah aset tetap yang dapat digunakan secara terus menerus selama perusahaan menghendaknya tanpa harus memperbaiki atau menggantinya, seperti tanah.
2. Aset tetap yang umurnya terbatas dan bisa diganti dengan aset lain yang sejenis adalah jenis aset tetap yang memiliki umur ekonomis maupun umur teknis yang terbatas, bila sudah tidak menguntungkan (beban yang dikeluarkan lebih besar dari manfaatnya) maka aset seperti ini harus diganti dengan aset lain sejenis, seperti bangunan, mesin, kendaraan dll.
3. Aset tetap yang umurnya terbatas dan tidak dapat diganti dengan aset yang sejenis adalah aset tetap sekali

pakai dan tidak dapat diperbarui karena isi dari aset itulah yang dibutuhkan, seperti tanah pertambangan dan hutan.

Menurut Sinarwati (2017, p.76), berdasarkan jenis, aktiva tetap dapat digolongkan menjadi :

- 1) Lahan
Lahan adalah bidang tanah terhampar, baik yang merupakan tempat bangunan maupun yang masih kosong. dalam akuntansi apabila ada lahan yang didirikan bangunan di atasnya harus dipisahkan pencatatannya dari lahan itu sendiri. Khusus untuk bangunan yang dianggap sebagai bagian dari lahan tersebut atau yang dapat meningkatkan nilai gunanya, seperti riol, jalan, dan lain-lain maka dapat digabungkan dengan nilai lahan.
- 2) Bangunan gedung
Gedung adalah bangunan yang berdiri di atas bumi ini baik di atas lahan/air. Pencatatannya harus terpisah dari lahan yang menjadi lokasi gedung itu.
- 3) Mesin
Mesin termasuk peralatan-peralatan yang menjadi bagian dari mesin yang bersangkutan.
- 4) Kendaraan
Semua jenis kendaraan seperti alat pengecutan, truk, grader, traktor, forklit, mobil, kendaraan roda dua, dan lain-lain.
- 5) Perabot
Dalam jenis ini termasuk perabot kantor, perabot laboratorium, perabot pabrik yang merupakan isi dari suatu bangunan.
- 6) Inventaris/peralatan.
Peralatan yang dianggap merupakan alat-alat besar yang digunakan dalam perusahaan seperti inventaris kantor, inventaris pabrik, inventaris gudang dan lain-lain
- 7) Prasarana.
Merupakan kebiasaan bahwa perusahaan membuat klasifikasi khusus seperti, jalan, jembatan, pagar, dan lain-lain.
Menurut Prasetya (2017, p.121), aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, antara lain :

1. Pembelian Tunai
Aset tetap yang diperoleh melalui pembelian tunai dicatat dalam buku dengan jumlah sebesar uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut.
2. Pembelian Angsuran
Aset tetap yang diperoleh melalui pembelian angsuran, harga perolehan aset tetap tersebut tidak termasuk bunga. Bunga selama masa angsuran harus dibebankan sebagai beban bunga periode akuntansi berjalan.
3. Ditukar Dengan Surat Berharga
Aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran dengan surat berharga, baik saham atau obligasi perusahaan tertentu.
4. Ditukar Dengan Aset Tetap Yang Lain
Aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran dengan aset lain, maka prinsip harga perolehan tetap harus digunakan untuk memperoleh aset yang baru tersebut.
5. Diperoleh Sebagai Donasi
Aset tetap yang diperoleh sebagai donasi, maka aset tersebut dicatat dan diakui sebesar harga pasarnya Menurut Sinarwati (2017, p.79), perusahaan memperoleh aktiva dengan cara-cara berikut:
 1. Jual beli
 2. Membangun sendiri
 3. Tukar menukar
 4. Likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha
 5. Sumbangan/hibah
 6. Warisan
 7. Setoran modal
 8. Build, operate, dan transfer
 9. Sewa Guna Usaha
 Menurut Biswan (2017, p.165), entitas harus menerapkan kriteria pengakuan dalam menentukan pengakuan aset tetap. Oleh karena itu, entitas harus mengakui biaya perolehan aset tetap sebagai aset jika:
 - a. kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas;

- b. pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

2.2 Penyusutan

Menurut Biswan (2017, p.185), depresiasi adalah proses akuntansi dalam pengalokasian biaya aset berwujud dengan cara yang sistematis dan rasional selama periode yang diharapkan mendapat manfaat dari penggunaan aktiva tersebut.

Menurut Sinarwati (2017, p.85), penyusutan aktiva tetap merupakan alokasi secara periodik dan sistematis dari harga perolehan aktiva tetap selama periode yang memperoleh masa manfaat aktiva tetap tersebut.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018, p.16.11), entitas memilih model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama.

Model Biaya

Setelah diakui sebagai aset, aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset.

Model Revaluasi

Setelah diakui sebagai aset, aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi harus dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018, p.16.18), metode penyusutan yang digunakan mencerminkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomik masa depan dari aset oleh entitas. Metode penyusutan yang digunakan untuk aset di-review minimum setiap akhir tahun buku dan, apabila terjadi perubahan yang signifikan dalam ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut, maka metode penyusutan diubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut. Perubahan metode penyusutan

diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai dengan PSAK 25 (revisi 2009): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan. Berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang disusutkan secara sistematis dari suatu aset selama umur manfaatnya. Metode tersebut antara lain metode garis lurus (straight line method), metode saldo menurun (diminishing balance method), dan metode jumlah unit (sum of the unit method). Metode garis lurus menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah. Metode saldo menurun menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. Metode jumlah unit menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset. Metode penyusutan aset dipilih berdasarkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomik masa depan dari aset dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode kecuali ada perubahan dalam ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut.

Menurut Biswan (2017, p.185), suatu entitas harus memilih metode penyusutan yang mencerminkan ekspektasi dalam pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan aset. Beberapa metode penyusutan yang mungkin dipilih, antara lain

1. metode garis lurus (straight line method)
2. metode saldo menurun (diminishing balance method)
3. metode jumlah unit produksi (sum of the unit of production method)

Menurut Mardiasmo (2018, p.159)

Untuk menghitung besarnya penyusutan harta tetap berwujud dibagi menjadi dua golongan yaitu:

1. Harta berwujud yang bukan berupa bangunan.
2. Harta berwujud yang berupa bangunan.

Harta berwujud yang bukan bangunan terdiri dari empat kelompok, yaitu:

1. Kelompok 1 : kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 4 tahun.
2. Kelompok 2 : kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 8 tahun.
3. Kelompok 3 : kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 16 tahun.
4. Kelompok 4 : kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 20 tahun.

Harta berwujud yang berupa bangunan dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Permanen : masa manfaatnya 20 tahun.
2. Tidak permanen : bangunan yang bersifat sementara, terbuat dari bahan yang tidak tahan lama, atau bangunan yang dapat dipindah-pindahkan. Masa manfaatnya tidak lebih dari 10 tahun.

2.3 Pajak Penghasilan

Menurut Budiarto (2018, p.7), pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan pada badan atau orang pribadi atas penghasilan yang diperoleh pada satu tahun pajak.

Menurut Waluyo (2018, p.123), dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang adalah Penghasilan Kena Pajak. Tetap berlandaskan atau bersumber laporan keuangan perusahaan (daftar perhitungan laba rugi/profit and loss statement) setelah dilakukan koreksi fiskal positif dan/atau negatif dapat diperoleh penghasilan neto setelah koreksi. Rumus pajak terutang adalah Pajak Terutang = Tarif Pajak x Penghasilan Kena Pajak.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di PT. Sinar Langkat Perkasa Jl. Cemara Blk. D-E No.1 Medan. PT. Sinar Langkat Perkasa adalah distributor sparepart. Penelitian dilakukan pada bulan September 2020 hingga Maret 2021.

Unit data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menganalisis pengakuan dan penyusutan aset tetap pada PT Prima

Sentosa Lestari periode tahun 2020 berdasarkan PPh PPh dan menganalisis pengaruh penyusutan aset tetap terhadap perhitungan pajak penghasilan badan.

Penulis menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahun 2020, SPT PPh tahun 2020, daftar aktiva tetap dan penyusutan tahun 2020. Komunikasi dan dokumentasi langsung juga dilakukan kepada karyawan di PT. Sinar Langkat Perkasa guna mengumpulkan informasi mengenai penyajian laporan keuangan, perhitungan beban pajak penghasilan, dan perhitungan penyusutan tahun 2020.

Penelitian yang dilakukan adalah metode deskriptif berupa studi kasus untuk menganalisis penyusutan aktiva tetap. Langkah-langkah menganalisis data dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis penyajian laporan keuangan tahun 2020.
2. Menganalisis perhitungan beban pajak penghasilan entitas pada tahun 2020.
3. Menganalisis perhitungan penyusutan oleh perusahaan pada tahun 2020.
4. Menganalisis daftar aset tetap yang berisi tahun pembelian, masa manfaat, biaya pembelian, dan metode penyusutan masing-masing aset tetap pada tahun 2020.
5. Menganalisis metode penyusutan aktiva tetap pada perusahaan dengan mempertimbangkan ketentuan pajak penghasilan.
6. Menganalisis dampak penyusutan aset tetap terhadap beban pajak penghasilan entitas pada tahun 2020.
7. Memberikan kesimpulan atas pelaksanaan penyusutan aktiva tetap dalam perusahaan dan dampaknya terhadap beban pajak penghasilan badan.
8. Memberikan rekomendasi dari hasil penelitian dan keterbatasan dalam melakukan penelitian ini

4. PEMBAHASAN

Beban penyusutan merupakan salah satu beban yang berdampak pada penghasilan kena pajak sehingga akan berdampak pada pajak penghasilan yang terutang. Beban penyusutan merupakan salah satu komponen beban yang dapat dikurangkan dari pendapatan bruto berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf b undang-

undang pajak penghasilan. Dalam perhitungan pajak, tingginya biaya yang dapat dikurangkan dapat menurunkan penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan. Jika terdapat selisih antara penyusutan dalam perusahaan dengan penyusutan fiskal, maka koreksi fiskal harus dilakukan dalam menghitung pajak penghasilan badan. Perhitungan PPh Badan berdasarkan ketentuan PPh dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.1
Perhitungan Pajak Penghasilan yang Tepat di Tahun 2020

Keterangan	Jumlah (Rp.)
Laba bersih komersial	1,850,623,980.00
Koreksi positif :	
Sumbangan	10,000,000.00
Hadiah	20,000,000.00
Tunjangan beras	20,000,000.00
Olahraga	25,000,000.00
Penyusutan bangunan	60,000,000.00
Penyusutan perabotan	30,750,000.00
Koreksi negatif:	
Pendapatan bunga	-17,749,557.00
Penghasilan kena pajak	1,998,624,423.00
Penghasilan kena pajak pembulatan	1,998,624,000.00
Beban pajak penghasilan	439,697,280.00
Kredit pajak :	
Pajak penghasilan pasal 25	367,571,178.00
Pajak penghasilan pasal 29 (kurang bayar)	72,126,102.00

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pajak penghasilan badan setelah perhitungan beban penyusutan berdasarkan ketentuan pajak penghasilan adalah sebesar Rp 439.697.280,00. Hal ini dapat terjadi karena terdapat beberapa koreksi fiskal yang positif pada beban depresiasi. Setelah dilakukan perhitungan beban penyusutan berdasarkan ketentuan PPh, maka koreksi fiskal beban penyusutan gedung adalah sebesar Rp 60.000.000,00 dan koreksi fiskal beban penyusutan perabot dan perlengkapan sebesar Rp 30.750.000.00. Terdapat kenaikan pajak penghasilan badan sebesar Rp 90.750.000.00 setelah penerapan metode penyusutan berdasarkan ketentuan pajak

penghasilan. Terdapat kurang bayar pajak penghasilan badan sebesar Rp 19.965.000. Perusahaan harus mempertimbangkan ketentuan pajak penghasilan untuk menentukan pembayaran pajak penghasilan entitas yang tepat.

5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis beban penyusutan pada perusahaan, kesimpulan dari penelitian ini adalah penyusutan aktiva tetap pada PT. Sinar Langkat Perkasa Medan tahun 2020 tidak sesuai dengan ketentuan PPh. Perusahaan menerapkan metode garis lurus dalam menghitung beban penyusutan. Kelompok aset tetap tidak ditentukan dengan baik oleh perusahaan. Perusahaan tidak menghitung beban penyusutan bangunan dan perabotan dengan baik sesuai dengan ketentuan pajak penghasilan. Beban penyusutan aset tetap yang diperhitungkan oleh perusahaan adalah sebesar Rp 533.875.000,00 dan beban penyusutan aset tetap berdasarkan ketentuan pajak penghasilan adalah sebesar Rp 443.125.000,00. Terdapat selisih penyusutan aset tetap sebesar Rp 90.750.000,00. Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan umur manfaat dan tingkat penyusutan aset tetap. Beban penyusutan bangunan yang diperhitungkan oleh perusahaan adalah Rp 240.000.000,00 sedangkan beban penyusutan bangunan berdasarkan ketentuan pajak penghasilan adalah Rp 180.000.000,00. Beban penyusutan perabot rumah tangga yang diperhitungkan oleh perusahaan sebesar Rp 82.000.000,00 sedangkan beban penyusutan perabot rumah tangga berdasarkan ketentuan PPh sebesar Rp 51.250.000.000,00.

Perusahaan harus melakukan koreksi fiskal sebesar Rp 90.750.000,00. Setelah penerapan penyusutan aset tetap berdasarkan ketentuan pajak penghasilan, beban pajak penghasilan badan adalah Rp 439.697.280,00.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- 1 Perusahaan harus menghitung beban penyusutan berdasarkan Provisi Pajak Penghasilan. Perusahaan sebaiknya menggunakan metode penyusutan berdasarkan Ketentuan Pajak Penghasilan dalam menghitung beban penyusutan.
2. Perusahaan harus memahami ketentuan pajak penghasilan dalam melakukan perhitungan beban penyusutan. Kelompok aset tetap harus ditentukan berdasarkan ketentuan pajak penghasilan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar, I. H. (2019). *Akuntansi Dasar*. Sleman: Penerbit Deepublish
- Biswan, A. (2017). *Akuntansi Keuangan*. Banten: Unit Penerbit PKN STAN
- Budiarto, A. (2018). *Pedoman Praktis Membayar Pajak*. Yogyakarta : Penerbit Genesis Learning
- Direktur Jenderal Pajak. (2020). *Cipta Kerja*. Diperoleh pada 27 Januari 2021 dari www.pajak.go.id
- Giri, E.F. (2017). *Akuntansi Keuangan Menengah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Oleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Diperoleh pada 27 Januari 2021 dari www.pajak.go.id.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

- Marina, A. (2017). *Sistem Informasi Akuntansi*. Surabaya: Penerbit UMSurabaya Publishing
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Myactivo. (2018). *Strategi Mengurangi Beban Pajak Melalui Penyusutan Harta atau Aset*. Diperoleh pada 27 Januari 2021 dari <http://activo.co.id/strategi-mengurangi-beban-pajak-melalui-penyusutan-harta-atau-aset/>
- Nitalia, Deni. (2017). *Analisis Metode Penyusutan Aktiva Tetap untuk Menghitung Pajak Penghasilan Badan*. Diperoleh pada 27 Januari 2021 dari http://simki.unpkediri.ac.id/mahasiswa/file_artikel/2017/12.1.01.04.0050.pdf
- Prasetya, H. (2017). *Akuntansi Keuangan*. Surabaya: Badan Penerbit STIE Mahardhika.
- Resmi, S. (2018). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Sinarwati, N.K. (2017). *Pengantar Akuntansi*. Singaraja: Undiksha Press.
- Stice, E. (2018). *Intermediate Accounting*. Ohio : South Western Cengage Learning.
- Sumarsan, T. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Indeks.
- Waluyo. (2018). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.